

# KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

**Mahendra Wijaya**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

## ***Abstract***

*Neoliberal capitalism resulted in de-industrialization and triggered an economic crisis, a jump in unemployment, income uncertainty and poverty. Poverty in developing countries associated with the exploitation of labor and nature. Poverty is pervasive in the developing countries population in the multidimensional life. There is a tendency of empowerment-based poverty alleviation. Empowering communities mean that the growth of power and authority to act on the community to solve their own problems. Embodiment of independence was marked by increasing empowerment of social groups in fulfilling basic needs (clothing, food, health and education) for their members.*

***Keywords:*** *community empowerment, rural, deindustrialization, poverty*

## **PENDAHULUAN**

Peet (2003) dalam *Unholy Trinity* mengungkapkan globalisasi menjadi wadah dunia modern yang dicekakkan Barat kepada dunia berkembang melalui doktrinnya. Perdagangan bebas merupakan jaminan satu-satunya bagi kesejahteraan dunia. Globalisasi yang kita alami saat ini tidaklah berjalan secara alami. Tetapi sebuah proses eksplisit yang sistematis dalam menerapkan kembali sistem perdagangan bebas (neoliberalisme). Kapitalisme neoliberal mengakibatkan ketimpangan sosial belahan dunia utara dan selatan. Di negara-negara dunia ketiga, kapitalisme neoliberal menyebabkan terjadinya de-industrialisasi dan memicu krisis ekonomi, lonjakan pengangguran, ketidakpastian penghasilan dan terpuruk ke dalam kemiskinan.

Negara-negara dunia ketiga cenderung mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan. Bagaimana pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan? Jawaban terhadap masalah tersebut bermanfaat bagi upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat lokal.

## **PEMBAHASAN**

Kemiskinan penduduk di negara-negara dunia ketiga berhubungan dengan eksploitasi terhadap tenaga kerja dan alam. Eksploitasi alam yang berlebihan dalam masyarakat industri mengakibatkan hancurnya cadangan subsistensi, wabah penyakit,

tekanan psikologis dan patologi sosial (Scott, 1977). Oleh sebab itu kemiskinan penduduk di negara-negara dunia ketiga merasuk ke dalam berbagai dimensi kehidupan manusia.

Dimensi ekonomi, sebagaimana tampak dalam pemahaman tentang kemiskinan absolut, suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sayogya (1977) mengkonversikan kemiskinan dengan nilai kilogram beras yang dikonsumsi dalam satu tahun. Menurutnya ada tiga golongan miskin; golongan paling miskin adalah mereka yang hanya mampu memenuhi konsumsi beras per tahun sebanyak 240 kg atau < 240 kg; golongan miskin sekali adalah mereka yang hanya mampu memenuhi konsumsi beras per tahun sebanyak 240 kg hingga 360 kg, dan lapisan miskin adalah mereka yang hanya mampu memenuhi konsumsi beras per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg. BPS mengkonversikan kemiskinan dengan nilai kebutuhan kalori, yaitu 2100 kalori perkapita perhari. Sedangkan World bank mempergunakan ukuran 2200 kalori perkapita perhari.

Dimensi keluarga, BKKBN menggunakan istilah keluarga pra sejahtera untuk kelompok miskin sekali, dengan menggunakan kriteria tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarganya pergi ke sarana kesehatan. Sedangkan istilah sejahtera 1 untuk kelompok miskin, dengan kriteria: paling kurang seminggu sekali makan daging, ikan atau telur, setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap huni.

Dimensi penguasaan lahan pertanian, dikembangkan adalah dengan cara menghitung ratio atau indeks gini. Indeks gini adalah suatu koefisien dengan rentang antara 0 – 1 yang menjelaskan kadar ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat akibat ketidakmerataan pembagian pendapatan nasional. Ditetapkan angka >0,5 adalah tingkat ketimpangan berat, 0,4 – 0,5 tingkat ketimpangan moderat dan <0,4 tingkat ketimpangan ringan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitarnya.

Dimensi budaya ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistis dan lain-lain. Dimensi struktural muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

### **Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

Di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia ada kecenderungan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Arti pemberdayaan masyarakat dalam konteks *community development* berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak pada masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri seperti ekonomi

dan kesehatan (Chambers: 1995). Wujud penumbuhan kekuasaan dan wewenang tersebut dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan hingga menikmati program pembangunan yang ditentukan oleh mereka sendiri, bahkan mereka diberi kesempatan untuk mengelola secara mandiri dana pelaksanaan program pembangunan.

Mahmudi (2002) menjelaskan istilah pemberdayaan (*empowerment*) berkaitan erat dengan proses transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/ lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dari strata sosial terendah sekalipun bisa terangkat dan muncul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah dan atas. Ini akan terjadi bila mereka bukan saja diberi kesempatan akan tetapi mendapatkan bantuan atau terfasilitasi pihak lain yang memiliki komitmen untuk itu. Kelompok miskin di perdesaan misalnya niscaya tidak akan mampu melakukan proses pemberdayaan sendiri tanpa bantuan atau fasilitasi pihak lain. Harus ada sekelompok orang atau suatu institusi yang bertindak sebagai pemicu keberdayaan (*enabler*) bagi mereka.

Terdapat tiga esensi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat.

Kedua, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana yang baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi serta pemasaran bagi masyarakat desa.

Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah. Memahami pemberdayaan yang kompleks seperti tersebut di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan petani adalah dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai dengan iklim usaha yang berkembang di masing-masing daerah.

Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga mediasi yang mengantarai antara publik dengan privat (Berger: 1977). Lembaga-lembaga sosial ketetanggaaan,

kekerabatan, keagamaan merupakan lembaga mediasi yang menjadi penglindung antara pemerintah, swasta dengan keluarga dan individu. Fasilitator memanfaatkan lembaga mediasi untuk langsung berhubungan dengan masyarakat di lapisan bawah. Ia memberikan peluang yang luas untuk menggerakkan dan melancarkan proses belajar masyarakat dalam membangun kehidupannya melalui kerja-kerja konkrit dan melalui uji coba-uji coba skala mikro, kecil, dan menengah. Dalam kaitan ini fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dan strategis. Fasilitator bukanlah pekerja yang semata-mata bekerja dengan model "tukang" tetapi mereka adalah aktivis yang bekerja penuh komitmen dan kreativitas serta memiliki semangat tinggi membantu masyarakat belajar membebaskan dirinya dari segala bentuk dominasi yang memiskinkan dan membodohkan.

Tugas utama fasilitator pemberdayaan adalah mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi politik yang berlangsung secara mapan disertai upaya memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog sehingga mempunyai kapasitas transaksional dan diharapkan bisa mengambil posisi tawar yang kuat dengan kekuatan lain. Upaya-upaya itu harus disertai dengan menggalang kemampuan untuk membentuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan mereka. Utami (2004) memberikan arti dasar fasilitasi adalah meringankan dan memudahkan. Sedangkan fasilitasi secara sederhana adalah mempertemukan individu dan atau kelompok dalam sebuah dialog yang bentuknya bisa berupa mediasi, konsultasi dan memuat jaringan (*network*). Hasilnya diarahkan pada lahirnya sebuah kesepakatan yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Sedangkan individu atau kelompok yang menjalankan fungsi tersebut disebut dengan fasilitator. Peran dan fungsi fasilitator adalah sebagai berikut :

- a. Bersikap sabar dan tidak mendominasi. Salah satu sikap dasar dalam menerapkan metode partisipatif adalah aspek belajar dan itu memerlukan waktu. Maka yang harus diingat adalah jika fasilitator kurang sabar dalam melihat proses yang terjadi, bisa-bisa fasilitator justru mengambil alih, yang berarti fasilitator telah mengambil alih kesempatan belajar masyarakat.
- b. Bersikap rendah hati dan menghargai peserta. Caranya adalah dengan menunjukkan minat sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Penghargaan bukan pada individu orang perorang tapi masyarakat secara keseluruhan.
- c. Melebur dalam kelompok. Artinya partisipasi secara penuh dalam setiap kegiatan, jangan sampai menjadi penonton.
- d. Bersikap terbuka. Caranya dengan mendorong peserta untuk mengemukakan pendapat dan menganalisis masalahnya antara lain dengan pertanyaan kritis. Ingat tugas fasilitator adalah menggerakkan diskusi bukan mengarahkan.

- e. Bersikap sederajat dan tidak menggurui. Artinya jangan menjadi orang yang paling tahu segalanya tetapi bersikaplah sebagai orang yang ingin belajar.
- f. Bersikap akrab dan tidak menjaga jarak. Diskusi yang dilakukan bersifat santai sehingga menimbulkan keakraban dan mereka menjadi bagian dari proses tersebut.
- g. Bersikap kreatif. Seorang fasilitator harus menjaga agar masyarakat tetap berminat dalam kegiatan kelompok, jangan sampai menimbulkan kejenuhan. Karena itu perlu diciptakan kegiatan yang kreatif yang mendorong anggota kelompok tersebut tetap ingin terlibat dalam kegiatan. Memecahkan kejenuhan bisa dengan cara *ice breaker*, peserta diajak bersimulasi, atau memainkan sebuah permainan.
- h. Tidak memihak. Fasilitator harus bersikap netral dan tidak melakukan penilaian tertentu.
- i. Tidak menyalahkan peserta. Fasilitator tidak berhak menyalahkan pendapat peserta. Biarkan agar terjadi wacana dalam forum tersebut dengan cara mengemukakan perbandingan.
- j. Memecahkan budaya bisu dan *ewuh pakewuh*. Dengan cara memberikan kesempatan berbicara bagi masyarakat yang berada dalam struktur paling bawah.

Berdasarkan peran dan fungsi fasilitator tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat melibatkan strategi sebagai berikut :

- a. Memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus secara terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro menjadi *policy input* dan *policy reform* sebagai unsur utama pemberdayaan sehingga memiliki dampak yang lebih luas.
- b. Membangun kembali kelembagaan rakyat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat. Peranserta masyarakat secara teknis membutuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri.
- c. Pengembangan kesadaran rakyat. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal politik ekonomi maka tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Yang diperlukan adalah tindakan politik yang berbasis pada kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokrasi ekonomi. Pendidikan alternatif dan kritis merupakan pendekatan yang sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran rakyat.

- d. Redistribusi sumberdaya ekonomi merupakan syarat pokok pemberdayaan rakyat. Redistribusi aset bukanlah sejenis hibah. Tetapi merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pemberdayaan sumberdaya ekonomi nasional serta pendayagunaannya dengan segala resiko dan keuntungan yang dihadapi.
- e. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Sudah tidak zamannya lagi mempertentangkan pendekatan ekonomi dan lingkungan. Memperpanjang perdebatan ekonomi akan memperpanjang deretan kerusakan sumberdaya lingkungan yang akan mengancam terhadap proses pembangunan itu sendiri. Yang harus diwujudkan adalah setiap peristiwa pembangunan harus mampu secara terus menerus mengkonversi daya dukung lingkungan. Dengan demikian daya dukung lingkungan akan dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan.
- f. Kontrol kebijakan dan advokasi. Upaya menciptakan sistem ekonomi modern dan meninggalkan sistem ekonomi kapitalisme buruk (*bad capitalism*) haruslah didukung oleh berbagai kebijakan politik yang memadai oleh pemerintah. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya pemberdayaan rakyat maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan upaya pemberdayaan rakyat haruslah diadvokasi. Untuk ini sangatlah penting muncul kelompok penekan yang melakukan peran kontrol terhadap kebijakan.
- g. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai kondisi lokal (daerah). Ini merupakan upaya untuk menggeret gerbong ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Yang dimaksud produk strategis (unggulan) di sini tidak hanya produksi yang ada di masyarakat laku di pasaran, tetapi juga unggul dalam hal bahan baku yang teknis produksinya, serta memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi.
- h. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar di samping keragaman model yang didasarkan atas keunggulan antara kawasan satu dengan lainnya. Lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.
- i. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan rakyat pada *input* luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat menggerakkan proses

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting untuk dikembangkan.

- j. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Di samping itu jaringan strategis juga akan berfungsi sebagai media pembelajaran rakyat dalam berbagai aspek dan advokasi.
- k. Diperlukan perubahan pandangan yang lebih terbuka dari komunitas riset dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kerjasama-kerjasama strategis dengan kekuatan-kekuatan lain seperti pemerintah, legeslatif, pengusaha, organisai-organisasi sosial, LSM baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

## **2. Penguatan Kemandirian Kelompok-kelompok Sosial Ekonomi**

Perwujudan kemandirian adalah semakin berdayanya kelompok-kelompok sosial ekonomi. Misalnya kasus pengembangan ayam buras berbasis pemberdayaan di Desa Jenar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo (Wijaya: 2008). Langkah-langkah yang dijalankan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun saling percaya di antara partisipan
- b. Membangun hubungan kesetaraan, yaitu memandang setiap orang yang terlibat mempunyai posisi yang sejajar
- c. Setiap partisipan memperoleh peluang untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan pemikirannya. Pemandu atau pemimpin kelompok bukan ditempatkan sebagai orang yang harus diikuti, tetapi sebagai pengatur jalannya organisasi atau kelembagaan.
- d. Demokrasi artinya semua keputusan harus atas persetujuan dari partisipan, keputusan melalui hasil konsensus lebih baik dari miving.
- e. Terbuka menerima kritik dan masukan demi untuk perbaikan ke depan serta bersedia menerima perbedaan.
- f. Tidak ada dominasi dalam kelompok.
- g. Secara bersama-sama mengembangkan pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha seperti manajemen pengembangan ayam buras. Pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh semua anggota kelompok mencakup:
  - 1) seleksi dan pengadaan bibit ayam buras yang sehat
  - 2) membikin kandang ayam buras
  - 3) membuat pakan ayam buras

- 4) pemberian pakan yang teratur
- 5) penanganan kesehatan ayam buras (pemanfaatan obat dan vaksin)
- 6) mengembangkan berbagai cara hasil olahan dari produksi telur ayam buras
- 7) perencanaan produksi dan pemasaran

Pengembangan ternak ayam buras ternyata dapat mendukung produk telur dan daging meningkat di pasaran regional dan nasional. Peningkatan usaha ternak ayam buras menumbuhkan penghasilan bagi rumah tangga, kelompok sosial dan masyarakat desa. Peningkatan penghasilan tersebut mendukung upaya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan) masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kapitalisme neoliberal menyebabkan terjadinya de-industrialisasi dan memicu krisis ekonomi, lonjakan jumlah pengangguran, ketidakpastian penghasilan dan terpuruk ke dalam kemiskinan. Kemiskinan di negara-negara dunia ketiga berhubungan dengan eksploitasi terhadap tenaga kereja dan alam. Kemiskinan penduduk di negara berkembang merupakan kemiskinan multidimensi kehidupan.

Di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia ada kecenderungan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Arti pemberdayaan masyarakat dalam konteks *community development* berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak pada masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Fasilitator pemberdayaan bertugas mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Perwujudan kemandirian ditandai dengan semakin tingginya keberdayaan kelompok-kelompok sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok anggotanya.

## Daftar Pustaka

- Berger, Peter L and Neuhaus, Richard J. 1977. *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*. Washington, American Institute for Public Policy Research.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Masyarakat Desa , Mulai Dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Mahmudi, Ahmad. 2002. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Dinamika Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik. Edisi Agustus. 2002. FISIP UNS
- Peet, Richard, 2003, *Unholy Trinity: IMF, World Bank and WTO*. SIRD, Wits University Press and Zed Books.
- Sajogyo, 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSP-IPB . Bogor.
- Sajogyo, 1977. *Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*. Prisma (3) Maret. Jakarta. LP3ES .
- Scott, James C, 1977. *Moral Ekonomi Petani*. LP3ES. Jakarta.
- Utami, Trisni.2004. *Dinamika Kelompok Dalam Pemberdayaan*. Dilema. Sosiologi FISIP UNS. Medio 2004.
- Wijaya, Mahendra. 2008. *Pengembangan Ayam Buras Berbasis Pemberdayaan di Desa Jenar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo*. Sosiologi Fisip UNS.